



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Rabu 07 Mei 2025



## RINGKASAN BERITA HARI INI

Admin Medsos UPD Pemkad

### Tingkatkan Kemampuan “Secara Profesional Berbasis Data”

SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo meningkatkan kompetensi para admin media sosial (medsos) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sidoarjo menargetkan para admin mampu mengelola media komunikasi publik secara profesional berbasis data.

Senin sore (5/5/25), seluruh admin medsos OPD mengikuti program pelatihan pengelolaan medsos yang digelar di Aula BKD Sidoarjo selama tiga hari. Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Fenny Apridawati, hadir langsung membuka pelatihan hari pertama.

Sekda Fenny mengapresiasi pelaksanaan pelatihan tersebut. Menurutnya, saat ini medsos memegang peranan penting dalam penyebaran informasi. “Era pertelevisian sebagai sumber berita sudah bergeser ke medsos. Sekarang yang berjaya adalah medsos, dan panjenengan semua yang menguasainya,” ujarnya di hadapan puluhan admin medsos OPD.

Fenny meminta agar pemanfaatan semua kanal medsos dimaksimalkan, tidak hanya terpaku pada satu platform. Hal ini penting untuk



Seluruh admin medsos OPD mengikuti pelatihan pengelolaan medsos di Aula BKD Sidoarjo selama tiga hari mulai kemarin

mempercepat penyampaian informasi pembangunan Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat. Selain itu, ia menekankan pentingnya respons cepat terhadap aduan masyarakat melalui komentar di medsos pemerintah.

“Begitu ada masyarakat yang komen dan perlu direspons, yang penting dijawab cepat dulu,” pintanya.

Fenny juga meminta para admin medsos bersinergi dan berkolaborasi dengan pimpinan

masing-masing, mulai dari kepala bidang hingga kepala OPD. Ia bahkan akan mewajibkan para kepala OPD turut menjadi admin medsos sebagai bentuk kontrol dan pengawasan pemanfaatan medsos pemerintah.

“Saya minta tolong admin medsos diaktifkan lagi. Kemudian pimpinan OPD juga wajib menjadi admin medsos, dan resep sinergi, kolaborasi, glorifikasi, serta aktivasi harus betul-betul direfresh,” tegasnya.

Sementara itu, terpisah Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo, Noer Rochmawati Selasa (6/5/25), menyampaikan bahwa pemanfaatan medsos sebagai media komunikasi publik pemerintah memiliki manfaat signifikan. Oleh karena itu, para admin OPD perlu dibekali strategi mengelola konten medsos pemerintah daerah.

Dalam pelatihan tersebut, mereka juga dikenalkan dengan pemanfaatan teknologi artificial intelligence (AI) dan big data unlimited untuk merancang komunikasi publik yang tepat sasaran. Selain itu, admin OPD akan dilatih menggunakan media monitoring untuk mendeteksi opini publik dan isu strategis.

“Untuk mendukung pengelolaan medsos ini, Bapak Bupati juga telah memberikan fasilitas khusus kepada para admin, yakni langganan gratis satu bulan CapCut Pro,” ungkap Noer Rochmawati. ● Loe

## Bupati Siap Dukung Deltras, tapi Tunggu Manajemen Datang

KOTA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menggelar audiensi dengan kelompok suporter Deltras Sidoarjo, Deltamania, untuk membahas polemik tarif sewa Stadion Gelora Delta. Pertemuan tersebut berlangsung di Pendapa Delta Wibawa, Selasa (6/5).

Dalam audiensi tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi, menegaskan komitmennya untuk mendukung Deltras dan para suporter. Ia berharap klub berjudul The Lobster tetap bermarkas di Kota Delta.

Terkait permintaan keringanan biaya sewa stadion, Subandi menyatakan bahwa keputusan tersebut akan dibahas lebih lanjut setelah manajemen Deltras datang langsung ke pendapa.

“Kita tunggu saja mereka datang. Kalau manajemen hadir, kita bisa duduk bersama dan membicarakan semuanya secara terbuka,” ujarnya kepada Radar Sidoarjo.

Subandi juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum pernah ada pertemuan resmi antara Pemkab Sidoarjo dan manajemen



MENDUKUNG: Suasana audiensi Bupati Sidoarjo, Subandi dengan kelompok suporter Deltras Sidoarjo, Deltamania.

Deltras. Oleh karena itu, ia menunggu inisiatif dari pihak klub untuk membuka komunikasi.

“Pemkab tidak perlu mengundang. Lucu kalau Bupati harus mengundang tamu. Silakan datang saja ke pendapa, kami terbuka,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Deltamania, Syaiful Bakirok, mengaku lega bisa menyampaikan aspirasi secara langsung kepada bupati.

Ia menyebut audiensi ini sebagai langkah awal membangun komunikasi antara pemerintah daerah dan manajemen klub.

“Kami sudah sampaikan semua unek-unek. Sekarang tinggal manajemen Deltras yang perlu menindaklanjuti dengan menemui bupati,” katanya.

Syaiful menambahkan, pihaknya akan mendorong CEO Deltras untuk segera menjadwalkan pertemuan

dengan bupati. Menurutnya, respons positif dari bupati harus segera ditindaklanjuti demi keberlangsungan klub kebanggaan warga Sidoarjo.

“Kami akan konsultasi dengan CEO Deltras agar segera mengatur pertemuan dengan bupati,” pungkasnya. (sai/vga)

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan  
Sekretariat DPRD Sidoarjo



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih memimpin dalam persidangan rapat Paripurna DPRD Sidoarjo pada, Selasa (6/5/2025). rapat ke satu masa persidangan ke tiga tahun sidang 2025, tentang Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Sidoarjo Membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024, rapat kami buka dan kami nyatakan terbuka untuk umum.

Dengan diawali pembacaan surat masuk yang di sampaikan oleh sekretaris DPRD Sidoarjo Hari Sucahyono, Surat masuk, surat Bupati Sidoarjo tanggal 29 April 2025 Nomor: 100. 3.2/4509/438. 1. 1. 3/2025, perihal penyampaian Raperda dan Raperbub.



Selanjutnya Abdillah Nasih mempersilahkan Bupati Subandi untuk menyampaikan nota penjelasan Bupati Sidoarjo terhadap Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Bupati Sidoarjo.

H. Subandi sebelum menyampaikan nota pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2024, telah mwmbagikan salam dan menyapa semua tamu undangan yang hadir.

Selanjutnya penyampaian nota penjelasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024. Sesuai dengan amanat dan peraturan pemerintah nomor 12 pada tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah mutlak dijalankan oleh pemerintah daerah mulai dari perencanaan pelaksanaan tata usahaan. Laporan dan pertanggungjawaban dan pengawasan yang menjadikan bagian untuk mewujudkan tata kelompok yang baik dengan tiga pilar utama yaitu transformasi akuntabilitas dan partisipatif berdasarkan ketentuan pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 pada tahun 2019.

Kepala Daerah menyampaikan Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPR dengan dilampiri laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 pada tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.

laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Sidoarjo pada tahun 2024 yang telah diperiksa oleh BPK RI yang diserahkan oleh Kepala BPK RI perwakilan Provinsi Jawa Timur Kepada Bupati Sidoarjo dan ketua DPR Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 17 April 2025. syukur alhamdulillah tanpa kecuali Water Treatment Plant (WTP) kembali diberikan kepada Pemkab Sidoarjo untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut.



Dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 terdapat tujuh macam laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas juga laporan perubahan kuantitas dan catatan atas laporan keuangan.

Secara singkat Kami jelaskan ada tujuh macam laporan. Keuangan yang telah di audit oleh BPK RI perwakilan Provinsi Jawa Timur. Yang pertama laporan realisasi anggaran yaitu laporan keuangan yang diwajibkan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan Realisasi dalam satu periode laporan dengan rincian sebagai berikut



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Ketidakhadiran kebanyakan legislator diluar yang izin menunaikan ibadah Haji, memang telah menjadi haknya yang diatur dalam regulasi. Merupakan hak legislator bila memang menolak hadir pada paripurna DPRD, yang telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yakni mengatur tentang tugas, wewenang, dan kewajiban anggota DPRD. Dalam Tata Tertib DPRD, mengatur tentang prosedur dan mekanisme kerja DPRD, termasuk ketentuan tentang kehadiran anggota dalam rapat paripurna.

**[Baca Juga Sinergi Semesta! Pendidikan Inklusif Sidoarjo Menyala di Hardiknas 2025](#)**

Atau terdapat pula dalam Peraturan DPRD yang memiliki peraturan internal, mengatur tentang sanksi dan konsekuensi bagi anggota yang tidak hadir dalam rapat paripurna tanpa alasan yang sah. Alasan itu meliputi izin sakit atau keadaan darurat, tugas resmi lainnya yang tidak dapat ditinggalkan, dan izin dari pimpinan DPRD.

Sedangkan sanksi bagi anggota yang tidak hadir tanpa alasan yang sah dapat berupa teguran, potongan tunjangan, atau sanksi lainnya yang diatur dalam Tata Tertib atau peraturan DPRD. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa DPRD dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan efektif dan efisien.

Dalam beberapa kasus, boikot dapat menjadi pilihan terakhir jika anggota DPRD merasa bahwa kehadiran mereka tidak akan membawa perubahan positif. Namun, perlu diingat bahwa tindakan ini juga dapat berdampak pada proses legislasi dan pengawasan yang sedang berjalan.

Pada akhirnya, keputusan untuk hadir atau tidak hadir dalam rapat paripurna LKPJ Bupati harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan tujuan yang jelas.

Perlu dipertimbangkan beberapa aspek dari tidak hadirnya legislator di Paripurna, antara lain sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki tugas untuk mengawasi dan menilai kinerja pemerintah daerah, termasuk LKPJ Bupati. Kehadiran dan partisipasi aktif dalam rapat paripurna sangat penting untuk menjalankan fungsi ini.

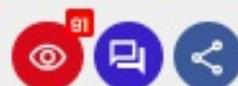
LKPJ Bupati merupakan salah satu mekanisme akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Dengan tidak hadir, anggota DPRD mungkin melewatkan kesempatan untuk memperoleh informasi penting dan melakukan pengawasan yang efektif.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

# Paripurna DPRD Sidoarjo Pertanggung Jawaban APBD TA 2024



Redaksi 6 Min Baca  
7 Mei 2025



Sidoarjo, Arjunanusantaranews.com, – Paripurna DPRD Sidoarjo pertanggungjawaban (PJ) APBD tahun 2024. Rapat Paripurna ini salah satu langkah krusial dalam proses pemerintahan daerah, dimana pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi tolok ukur, akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran. yang diadakan oleh DPRD Sidoarjo, pada Selasa (6/5/2025) diruamg rapat paripurna.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo rapat ke satu masa persidangan ke tiga Tahun sidang 2025 dengan acara penyampaian nota penjelasan Bupati Sidoarjo terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban (PJ) APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

Dalam Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2024 tersebut telah dihadiri oleh ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, Bupati Sidoarjo H. Subandi, Anggota DPRD, Forkopimda, para Komandan kepala Kesatuan TNI dan Polri, Ketua MUI Kabupaten Sidoarjo, Sekretaris daerah dan sejumlah pejabat di lingkungan Kabupaten Sidoarjo, serta kepala instansi vertikal direktur BUMN dan BUMD, Ketua KPU dan Bawaslu, Rektor Perguruan tinggi dan pimpinan partai politik serta undangan lainnya.



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Ruang Nurudin



Print PDF

**Sidoarjo, Ruang.co.id** – Suasana tampak cukup lengang di deretan depan diperuntukkan bangku anggota parlemen Sidoarjo, di ruang Sidang Paripurna DPRD Kab. Sidoarjo, Selasa siang (6/5). Dimana digelar dua sidang paripurna yakni Paripurna 1 yang digelar pada sesi 2 tentang Pembacaan surat masuk; Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Sidoarjo atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2025; dan penyampaian pidato Bupati Subandi.

Sedangkan sidang Paripurna 2 yang berlangsung di sesi pertama, tentang Laporan DPRD Kabupaten Sidoarjo atas pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Tahun 2024; Penyerahan Rekomendasi DPRD Kabupaten Sidoarjo kepada Bupati; dan Sambutan resmi dari Bupati Sidoarjo.

Di dua paripurna itu, dipimpin oleh Ketua DPRD Abdillah Nasih, dihadiri 16 orang anggota dari 50 anggota parlemen, atau hampir 70 persen anggota dari berbagai fraksi yang ada tidak mengikutinya. Bangku deretan separuh ke belakang paripurna itu justru dipadati anggota forkompimda, sekretaris daerah dan jajaran pemkab., pimpinan BUMD dan pimpinan cabang BUMN, pimpinan perguruan tinggi, undangan LSM, dan para jurnalis peliput.

Ketidakhadiran sebagian besar anggota DPRD ini dikaitkan sebagai bentuk kekecewaan terhadap Bupati Subandi?. "Kalau ketidakhadiran sebagian besar anggota ini disebut semata karena kecewa dengan bupati, saya kira tidaklah. Cuma hubungan anggota eksekutif dengan legislatif saat ini memang kurang harmonis. Itu tidak bisa dipungkiri," ujar M. Nizar, Ketua Fraksi Golkar di sidang paripurna.

Sebelum sidang digelar nampaknya ada aroma yang kurang sedap di ruang paripurna. Sempat beredar kasak-kusuk tentang sikap sebagian besar anggota DPRD yang konon akan melakukan 'boikot'.

Benarkah mereka masih belum bisa menerima atas statemen yang pernah terlontar dari abah Bandi sapaan akrab Bupati Subandi?, yang pernah mengungkapkan bahwa kinerja DPRD hanya menghambur-hamburkan uang. Bahkan isu terakhir berhembus soal sikap Bupati Subandi yang cenderung kurang menghormati lembaga legislatif ini.



Disinggung soal memenuhi kuorum, yang semestinya minimal 2/3 dari jumlah anggota hadir dalam paripurna, Ketua DPRD Abdillah Nasih menjawab dalam sidang paripurna kali ini agendanya bukan pengambilan keputusan, sehingga anggota dewan yang hadir, tidak harus memenuhi kuorum. Artinya berapa pun jumlah anggota yang hadir tidak berpengaruh, sidang paripurna bisa dilanjutkan.

"Diantara yang tidak hadir, empat orang beralasan karena kesibukan, empat orang lagi tengah menunaikan ibadah haji. "Kalau mau jujur, sebenarnya hal ini juga sering terjadi di mana-mana. Dan kalaupun ada alasan lain, bahwa sebagian besar anggota absen karena kecewa, itu pun juga bisa saya pahami," ujar Nasih. Dua agenda paripurna pun tetap dilanjutkan dan berlangsung lancar hingga berakhir sekitar pukul 16.00 WIB.

Keputusan anggota DPRD untuk tidak hadir dalam rapat paripurna LKPJ Bupati sebagian dapat dipahami dalam konteks tertentu. Jika anggota DPRD dikategorikan melakukan boikot sebagai bentuk protes terhadap kebijakan atau kinerja Bupati, perlu dipertimbangkan apakah tindakan ini efektif dan konstruktif dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Usman, legislator DPRD Sidoarjo beberapa saat usai paripurna dalam sebuah obrolan perdebatan WhatsApp Group / WA grup, mengaitkan ketidakhadiran sebagian besar anggota dewan di paripurna itu, salah satunya merupakan wujud protes legislator terhadap kinerja Bupati.

"Tidak hadir (legislator) Rapat Paripurna itu jangan diartikan malas / tidak menjalankan tugas. Tapi bisa juga karena mengambil sikap politik anggota DPRD. Karena antara Bupati dan DPRD kedudukannya sejajar tapi dalam fungsi yang berbeda. Jadi jangan sekali kali masing – masing pihak merasa paling kuasa," tukas Usman.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Sebaliknya, ada pula fraksi yang pimpinannya memerintahkan hadir, tapi anggotanya justru memilih absen. Melawan pimpinan dan ketua fraksi.

Benarkah ketidakhadiran anggota DPRD Sidoarjo dalam rapat paripurna itu terorganisir? Belum ada pernyataan resmi dari para pimpinan fraksi. Apakah mereka memang "janjian" absen massal atau inisiatif sendiri-sendiri. Juga tidak ada yang secara terbuka menyatakan memboikot paripurna.

Yang pasti, fraksi yang anggotanya total absen adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN, dan Fraksi PKS-PPP. Adapun dari Fraksi PKB, PDIP, dan Demokrat-Nasdem, sebagian hadir. Sebagian lain tidak. Hanya Fraksi Partai Golkar yang hampir lengkap kecuali Warih Andono yang izin naik haji.



*Bupati Sidoarjo Subandi, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih (PK), dan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Suyarna (PDIP) bersiap menyanyikan lagu Bagimu Negeri setelah rapat paripurna berakhir. (Foto: Fathur Rozaq/Ketik.co.id)*

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menjelaskan, ketidakhadiran sebagian besar anggota DPRD Sidoarjo dalam rapat paripurna itu bukan kali pertama. Peristiwa ini bisa dipandang dari dua sisi. Pertama, ketidakhadiran anggota itu akan menjadi evaluasi pimpinan dewan dan pimpinan fraksi-fraksi.

"Dari sisi kami, ini menjadi bagian dari evaluasi kami. Bahwa antara hak dan kewajiban harus berimbang," ungkap Abdillah Nasih setelah rapat paripurna.

Menurut dia, rapat paripurna dan hearing merupakan kewajiban sebagai anggota DPRD Sidoarjo sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

"Nanti kami panggil, kita undang, pimpinan fraksinya," tegas Abdillah Nasih.

#### **Baca Juga:**

**[Sekolah Boleh Adakan ODL Lagi, Bupati Subandi Minta Tetap Utamakan Keselamatan Anak Didik](#)**

**Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo**

Ditanya soal kuorum atau tidak, Abdillah Nasih menyatakan bahwa rapat paripurna DPRD Sidoarjo tentang pandangan terhadap LKpj Bupati 2024 itu memang tidak harus kuorum. Karena bukan forum pengambilan keputusan.

Kedua, lanjut Abdillah Nasih, DPRD Sidoarjo merupakan lembaga politik. Minimnya kehadiran anggota DPRD Sidoarjo menjadi bahan introspeksi bersama. Baik legislatif maupun eksekutif.

# LKPJ Bupati Subandi Diboikot? Sidang Paripurna Sidoarjo Sepi Wakil Rakyat

Selasa, 6 Mei 2025 | 23:12 WIB



Hanya 16 dari 50 anggota DPRD Sidoarjo hadir sidang LKPJ Bupati Subandi. Bentuk protes ataukah laporan tetap sah? Foto: Istimewa



Ads by Ruang.co.id

**Banyak dibaca**



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Dari Fraksi PDIP, hadir Wakil Ketua DPRD Suyarno dan Kusumo Adi Nugroho. Dari Fraksi Demokrat, hadir Zahrul Yussar dan Agiel Effendi. Satu-satunya yang hadir hampir lengkap ialah Fraksi Partai Golkar. Ketua Fraksi Partai Golkar M. Nizar, Wahyu Lumaksono, Adiel Kanantha, Dian Felani. Adapun Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Golkar Warih Andono izin persiapan naik haji.



*Suasana rapat paripurna DPRD Sidoarjo yang dihadiri cuma 17 anggota DPRD. Banyak kursi anggota dewan yang kosong. (Foto: Fathur Raziq//Ketik.com.id)*

Lalu, siapa saja yang tidak hadir?

## Baca Juga:

**Anggota DPRD Sidoarjo Sidak Gubuk Bambu Reyot, tapi Tak Bisa Upayakan Perbaikan: Mengapa?**

Dari Fraksi PKB, H Usman MKes, Rizza Ali Faizin, Saifuddin, Abud Asrari, Atak Azhari, dan Sullamul Hadi Nurmawan (izin naik haji).

Dari Fraksi PDIP, Ketua Fraksi PDIP Tarkit Erdianto, Choirul Hidayat, Kasipah, Didik Prasetyo, Prabata Ferdiansyah, Bambang Riyoko, dan Raymond Tara Wahyudi.

Siapa yang tidak hadir lainnya? Anggota Fraksi PAN total tidak datang. Mereka Ketua Fraksi PAN Bangun Winarsa, Emir Firdaus, Rizal Fuadi, dan Rocky Wardoyo.

Fraksi PKS-PPP juga total tidak muncul di ruang rapat paripurna. Mereka adalah Aldhal M. Ihsan, Fitrotin Hasanah, Denny Haryanto, dan Vike Widya Asroni.

Yang juga total absen rapat paripurna adalah anggota Fraksi Gerindra. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD Kayan, Ketua Fraksi Muzayyin Safrial (naik haji), Pratama Yudiarta, Supriyono, Anang Siswandoko, Bambang Pujiyanto, Bashor, Yunik Nuraini, serta Irda Bella. Semua kompak absen.

Bagaimana Fraksi Demokrat-Nasdem? Yang ini berimbang. Separa hadir. Separa absen.

Yang hadir adalah Zahrul Yussar dan Agiel Effendi dari Demokrat. Separa yang absen ialah

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Belum Ada Yang Terang-terangan

Mengapa begitu banyak anggota DPRD Sidoarjo yang absen rapat paripurna? Beragam versi muncul. Ada yang menyebut bahwa ketidakhadiran mayoritas anggota DPRD Sidoarjo memang merupakan upaya boikot. Ada perintah dari pimpinan fraksi masing-masing.

**Baca Juga:**

**[CJH Sidoarjo Pertama Terbang ke Makkah, Dilepas Bupati Subandi Masuk Kloter II](#)**

Karena itulah, sebenarnya ada anggota yang ingin tetap hadir, tapi tidak berani melawan perintah. Hal itu terlihat dari anggota dan pimpinan fraksi yang hari itu terlihat di gedung DPRD. Namun, mereka sengaja tidak ikut paripurna.



Sebaliknya, ada pula fraksi yang pimpinannya memerintahkan hadir, tapi anggotanya justru memilih absen. Melawan pimpinan dan ketua fraksi.

Benarkah ketidakhadiran anggota DPRD Sidoarjo dalam rapat paripurna itu terorganisir? Belum ada pernyataan resmi dari para pimpinan fraksi. Apakah mereka memang "janjian" absen masal atau inisiatif sendiri-sendiri. Juga tidak ada yang secara terbuka menyatakan memboikot paripurna.

Yang pasti, fraksi yang anggotanya total absen adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN, dan Fraksi PKS-PPP. Adapun dari Fraksi PKB, PDIP, dan Demokrat-Nasdem, sebagian hadir. Sebagian lain tidak. Hanya Fraksi Partai Golkar yang hampir lengkap kecuali Warih Andono yang izin naik haji.



*Bupati Sidoarjo Subandi, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih (PK), dan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Suyama (PDIP) bersiap menyanyikan lagu Bagimu Negeri setelah rapat paripurna berakhir. (Foto: Fathur Rozaq/Ketik.co.id)*

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menjelaskan, ketidakhadiran sebagian besar anggota DPRD Sidoarjo dalam rapat paripurna itu bukan kali pertama. Peristiwa ini bisa dipandang dari dua sisi. Pertama, ketidakhadiran anggota itu akan menjadi evaluasi pimpinan dewan dan pimpinan fraksi-fraksi.

"Dari sisi kami, ini menjadi bagian dari evaluasi kami. Bahwa antara hak dan kewajiban harus berimbang," ungkap Abdillah Nasih setelah rapat paripurna.

Menurut dia, rapat paripurna dan *hearing* merupakan kewajiban sebagai anggota DPRD Sidoarjo sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

"Nanti kami panggil, kita undang, pimpinan fraksinya," tegas Abdillah Nasih.

#### **Baca Juga:**

**[Sekolah Boleh Adakan ODL Lagi, Bupati Subandi Minta Tetap Utamakan Keselamatan Anak Didik](#)**

Ditanya soal kuorum atau tidak, Abdillah Nasih menyatakan bahwa rapat paripurna DPRD Sidoarjo tentang pandangan terhadap LKpj Bupati 2024 itu memang tidak harus kuorum. Karena bukan forum pengambilan keputusan.

Kedua, lanjut Abdillah Nasih, DPRD Sidoarjo merupakan lembaga politik. Minimnya kehadiran anggota DPRD Sidoarjo menjadi bahan introspeksi bersama. Baik legislatif maupun eksekutif.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Karena masih saling tarik kepentingan yang cenderung merugikan DPRD, hal ini tentunya semakin merenggangkan harmonisasi kedua lembaga pemerintah tersebut. “Kalau ketidakhadiran sebagian besar anggota ini disebut semata karena kecewa dengan bupati, saya kira tidaklah. Cuma hubungan anggota eksekutif dengan legislatif saat ini memang kurang harmonis. Itu tidak bisa dipungkiri,” kata M. Nizar, Ketua Fraksi Golkar yang hadir dalam sidang paripurna tersebut.

Pihaknya menghormati sikap sejawat yang sebagian besar absen dalam sidang paripurna. “Ini sebenarnya hal lumrah, sudah sering terjadi. Hanya saja saat ini memang tengah terjadi ketidakharmonisan hubungan legislatif dan eksekutif, sehingga perlu segera ada penyelesaian,” tegas Nizar.

Pihaknya pun berharap unsur pimpinan DPRD melakukan langkah konsolidasi internal sebagai proses untuk menyelesaikan permasalahan yang membuat ketegangan hubungan dengan pihak eksekutif. “Unsur pimpinan DPRD, pimpinan fraksi dan BK harus segera duduk bersama membahas permasalahan. Saya kita teman-teman sepakat bahwa kepentingan masyarakat harus dikedepankan,” ujar Nizar.

Sidang paripurna agenda pandangan fraksi atas LKPj Bupati Sidoarjo dipimpin Ketua DPRD Abdillah Nasih didampingi Wakil Ketua Suyarno berjalan lancar selama dua jam. Sebelum memasuki sesi pokok,--pandangan fraksi, Wahyu Lumaksono, anggota fraksi Golkar berinterupsi. Dia mempersoalkan ketidakhadiran sebagian besar anggota DPRD dalam sidang tersebut. “Mohon, hal ini perhatian dan catatan penting pimpinan DPRD. Kita bekerja untuk kepentingan masyarakat, sehingga dalam sidang sidang selanjutnya bisa memenuhi kuorum. Minimal 2/3 dari jumlah anggota hadir dalam sidang,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Abdillah Nasih mengatakan dalam sidang paripurna kali ini agendanya bukan pengambilan keputusan, sehingga anggota dewan yang hadir tidak harus memenuhi kuorum. Artinya berapa pun jumlah anggota yang hadir tidak berpengaruh, sidang paripurna bisa dilanjutkan.

Ditambahkan, di antara mereka yang tidak hadir itu empat orang beralasan karena kesibukan, tiga orang lagi tengah menunaikan ibadah haji. “Kalau mau jujur, sebenarnya hal ini juga sering terjadi di mana-mana. Dan walaupun ada alasan lain, bahwa sebagian besar anggota absen karena kecewa, itu pun juga bisa saya pahami,” ujar Cak Nasih, sapaan Ketua DPRD yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Sidoarjo ini.

Lebih lanjut, Cak Nasih tidak menampik bahwa salah satu memicu kekecewaan anggota DPRD adalah persoalan program Pokir. Apalagi sampai sekarang pembahasan antara eksekutif dan legislatif belum memenuhi persepsi sama, bahkan cenderung mengabaikan kepentingan DPRD dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dari 700 Pokir yang kita usulkan, yang diakomodasi sekitar 200 saja. Pun dalam pelaksanaannya masih perlu dikonsolidasikan lagi, terutama antara yang dilelang dan di-PL (Penunjukan Langsung,-red). Ini yang sempat membuat kecewa teman-teman DPRD,” kata Nasih, seraya segera melakukan rapat internal melibatkan semua unsur pimpinan legislatif, sebagai langkah mendinginkan ketegangan suhu politik sekaligus merumuskan penyelesaiannya. (\*cak ful)



## Banyak Anggota DPRD Sidoarjo Absen Paripurna, Ini Nama-Nama Yang Hadir dan Tidak

7 Mei 2025 07:17



Fathur Roziq, Fathur Roziq  
Redaksi Kwik.co.id





Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Wahyu Lumaksono menyampaikan interupsinya saat rapat paripurna DPRD Sidoarjo pada Selasa sore (6 Mei 2025). (Foto: Fathur Roziq//ketik.co.id)

Politik & Pemerintahan



Aa

AA

**KETIK, SIDOARJO** – Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, Bupati Sidoarjo Subandi, dan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Suyarno sudah duduk di deretan kursi pimpinan. Sesekali ketiganya tersenyum. Saling berbisik. Rapat yang membahas LKPj Bupati 2024 itu pun dibuka pada Selasa (6 Mei 2025). Abdillah Nasih mengawali paripurna.

Namun, baru saja Abdillah Nasih mempersilakan juru bicara DPRD Sidoarjo Zahlul Yussar menyampaikan rekomendasi DPRD Sidoarjo terhadap LKPj Bupati, sontak terdengar interupsi.

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sidoarjo Wahyu Lumaksono berseru. Dia menyoroti banyaknya anggota DPRD Sidoarjo yang tidak hadir. Tidak enak dilihat oleh masyarakat. Kondisi ini harus menjadi pembelajaran.

"Bahwa pelayanan dan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas dan selalu di atas segalanya," ungkap Wahyu Lumaksono.

Menurut dia, ketidakhadiran anggota DPRD Sidoarjo pada rapat paripurna itu menjadi salah satu hambatan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Selain itu, kehadiran anggota DPRD Sidoarjo dalam rapat paripurna itu menjadi ceminan bahwa banyak hal yang seharusnya lebih bisa diprioritaskan.

"Forum paripurna ini penting sehingga kami berharap pimpinan bisa memberikan evaluasi kepada seluruh anggota bahwa hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi untuk berikutnya," tegas Wahyu Lumaksono. Wajah legislator muda itu tampak serius. Wahyu berharap forum-forum diskusi, dialog, dipertahankan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Mengapa Wahyu Lumaksono interupsi? Selasa sore (6 Mei 2025) itu, hanya 17 di antara 50 anggota DPRD Sidoarjo yang datang dalam rapat paripurna. Dari Fraksi PKB DPRD Sidoarjo, hadir Abdillah Nasih, Dhamroni Chudlori, Ainun Jariyah, Pujiono, M. Rafi Wibisono, Achmad Muzayyin, M. Rajik, Sutaji, dan Elok Suciati.



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Selain itu, Nasih juga menjelaskan saat ini terdapat tiga anggota DPRD Sidoarjo yang tidak hadir karena sedang pergi haji. Ketiganya diantaranya Sullamul Hadi Nurmawan (Fraksi PKB), Warih Andono (Fraksi Partai Golkar) dan Ahmad Muzayyin Syafrial (Fraksi Partai Gerindra).

"Jadi tidak ada masalah krusial atas tidak ketidakhadiran itu. Selain ada yang ikut prosesi haji juga ada yang masih diluar ada kepentingan lainnya," tandasnya. Hel/Waw



Selasa, 06 Mei 2025 23:52 WIB

**Kanwil DJP Jatim II Gandeng Koalisi Disabilitas Sidoarjo Gelar Workshop BDS Kembangkan UMKM Milik Difabel**

*Ini Daftar 16 anggota DPRD Sidoarjo yang ikut Paripurna Hari ini.*

1. Abdillah Nasih (PKB)
2. Suyarno (PDIP)
3. M Rojik (PKB)
4. Sutadji (PKB)
5. M Dhamroni (PKB)
6. Pujiono (PKB)
7. Achmad Muzayyin (PKB)
8. Kusumo Adi Nugroho (PDIP)
9. M Dian Felani (GOLKAR)
10. Adiel M Kanantha (GOLKAR)
11. Wahyu Lumaksono (GOLKAR)
12. Moh Nizar (GOLKAR)
13. Moch Agil (DEMOKRAT)
14. Zahlul yussar (DEMOKRAT)
15. Elok Suciati (PKB)
16. Ainun Jariyah (PKB)



# Diduga Kecewa, Sebagian Besar Anggota DPRD 'Boikot' Sidang Paripurna LKPj Bupati Subandi

"Persoalan Pokir sampai sekarang belum selesai. Dalam pembahasannya masih belum memenuhi persepsi sama antara eksekutif dan legislatif, sehingga perlu dikonsolidasikan lagi," kata Abdillah Nasih, Ketua DPRD Sidoarjo.

May 6, 2025 - 20:21



Sidang paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo membahas LKPj Bupati Sidoarjo hanya dihadiri 16 anggota.

NUSADAILY.COM – SIDOARJO: Sungguh ironis. Sidang Paripurna DPRD Sidoarjo dengan agenda pandangan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2024, pada Selasa (6/5/2025) sore, hanya dihadiri 16 legislator. Ketidakhadiran sebagian besar anggota DPRD ini disebut-sebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap Bupati H. Subandi.

Sebelum sidang digelar memang sempat beredar kasak-kusuk tentang sikap sebagian besar anggota DPRD yang akan melakukan 'boikot'. Berbagai alasan mereka sengaja tidak hadir dalam sidang paripurna membahas LKPj yang dihadiri Bupati Subandi.

Diantaranya, mereka masih belum bisa menerima atas statemen Abah Bandi, sapaan Bupati Sidoarjo ini yang pernah mengungkapkan bahwa kinerja DPRD hanya menghambur-hamburkan uang. Bahkan isu terakhir menyebutkan sikap Abah Bandi yang cenderung tidak menghormati lembaga legislatif, bahkan keberadaan anggota DPRD dinilai tidak penting.

Terlepas benar tidak semua rumor itu,--pemicu terjadinya ketidakharmonisan hubungan lembaga eksekutif dengan legislatif ini tak lepas dari persoalan pelaksanaan program Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sidoarjo. Pokir merupakan program pembangunan di segala aspek berangkat dari aspirasi masyarakat ditampung DPRD, yang selanjutnya diusulkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Anggota 4 Partai Absen Total, Paripurna DPRD Soal LKPJ Bupati Sidoarjo 2024 Separah Lebih Anggota Dewan Tidak Hadir



Republikjatim.Com

Selasa, 06 Mei 2025 19:21 WIB



Sidoarjo (republikjatim.com) – Rapat Paripurna Rekomendasi atau Pandangan Fraksi – Fraksi terkait LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun 2024 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo, hanya diikuti sekitar 16 anggota dari 50 anggota DPRD Sidoarjo, Selasa (06/05/2025) sore.

Jika dilihat dari jumlah kehadiran anggota dewan ini, dinilai sangat minim. Apalagi, tidak ada separoh dari anggota DPRD Sidoarjo yang hadir dalam rapat paripurna itu.



Rabu, 07 Mei 2025 00:58 WIB

### **Pengurus BWI Sidoarjo Dilantik, Bupati Berharap Mampu Gerak Aktif Kembangkan Potensi Waqaf di Kota Delta**

Dari sejumlah partai yang berhasil lolos menduduki kursi di DPRD Sidoarjo terdapat 4 anggota partai yang seluruh anggotanya tidak hadir. Diantaranya 9 anggota Fraksi Partai Gerindra, 4 anggota Fraksi PAN, 1 orang anggota PPP dan 4 anggota Fraksi PKS. Sedangkan terbanyak lain yang tidak hadir adalah dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKB.

Berdasarkan datanya dari 9 fraksi PDI Perjuangan hanya hadir dua orang yakni Suyarno dan Kusumo Adi. Kemudian dari Fraksi PKB dari 15 kursi hanya dihadiri 8 orang saja. Sedangkan yang hadir dengan formasi penuh hanya Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar yang tidak dihadiri Wakil Ketua Warih Andono saja.

Kondisi ini membuat salah seorang anggota Fraksi Partai Golkar, Wahyu Lumaksono langsung menginterupsi saat rapat paripurna itu dimulai. Alasan politisi muda partai Golkar ini, terlalu minimnya jumlah anggota DPRD Sidoarjo yang mengikuti rapat paripurna itu. Wahyu menanyakan minumannya tingkat kehadiran anggota dewan itu, apa tidak berpengaruh pada hasil paripurna saat itu.

"Rapat Paripurna ini tidak enak kalau dilihat rakyat. Bisa dianggap kita tidak kerja. Karena dalam paripurna ini yang hadir sangat sedikit. Kalau ini sebagai wujud pengabdian, seharusnya yang hadir dalam forum ini memenuhi quorum karena rapat paripurna ini penting," ujar Wahyu Lumaksono di depan pimpinan rapat dan Bupati Sidoarjo, Subandi yang hadir dalam rapat paripurna itu.

Interupsi itu langsung dijawab Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih. Cak Nasih menilai sidang rapat paripurna hari ini hanya untuk mendengar pandangan fraksi-fraksi atas LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun 2024. Karena itu, tidak dibutuhkan quorum lantaran tidak ada proses persetujuan.



Rabu, 07 Mei 2025 00:28 WIB

### **PPDI Sidoarjo Dilantik, Bupati Pesan Kawal Pembangunan Lewat Sinergi Kades dan BPD**

"Kami mempersilahkan jubi Fraksi Partai Demokrat, Zahlul Yussar untuk menyampaikan poin-poin pandangan fraksinya," katanya.



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Paripurna DPRD Sidoarjo Tidak Kuorum, Wakil Ketua Fraksi Golkar Interupsi Pimpinan Sidang

by Radar Jatim — 6 Mei 2025 in Politik

0



Wahyu Lumaksono, Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Sidoarjo melakukan interupsi saat rapat paripurna PU fraksi-fraksi terhadap LKPJ Bupati Sidoarjo.

149  
VIEWS



**SIDOARJO (RadarJatim.id)** – Sudah beberapa kali rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo tidak memenuhi kuota forum (kuorum), yaitu sebesar 50 persen plus satu.

Dengan kata lain, rapat paripurna seyogyanya dihadiri oleh 25 orang plus 1 anggota dewan. Sebab, anggota DPRD Sidoarjo bersama dengan 4 orang pimpinan lainnya jumlahnya 50 orang.

Pada 2 kali rapat paripurna sebelumnya, hanya dihadiri oleh 10 orang dan 13 orang anggota DPRD Sidoarjo saja. Dan, pada rapat paripurna DPRD Sidoarjo terkait Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo kali ini hanya dihadiri oleh 16 orang anggota dewan.

Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ada H. Abdillah Nasih, H. Damroni Chudlori, H. Pujiono, H. Rojik, H. Rafi Wibisono, H. Sutadji, Achmad Muzayyin dan Hj. Elok Suciati.

Fraksi Golkar ada Moh. Nizar, Wahyu Lumaksono, Adiel Muhammad Kanantha dan Muhammad Dian Felani. Dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ada Suyarno dan Kusumo Adi Nugroho. Serta anggota DPRD Sidoarjo dari Partai Demokrat ada Zahlul Yussar dan Mohamad Agil Efendi.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Sedangkan dari Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta anggota DPRD Sidoarjo dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak ada satu orang pun yang hadir.

Untuk itu, Wahyu Lumaksono, Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Sidoarjo melakukan interupsi saat rapat paripurna PU fraksi-fraksi terhadap LKPj Bupati Sidoarjo tersebut, Selasa (06/05/2025).

Dikatakan oleh Wahyu bahwa minimnya jumlah kehadiran dalam rapat paripurna mencerminkan tentang pelayanan serta kepentingan masyarakat menjadi prioritas penting dan diatas segalanya.

“Hal-hal seperti itu akan menghambat kinerja pemerintahan kita, karena kehadiran (anggota dewan, red) ini menjadi cerminan kinerja kita yang selalu dinilai oleh masyarakat,” katanya.

Anggota DPRD Sidoarjo dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sidoarjo 3 (Prambon, Tulangan, Krembung dan Wonoayu) itu mengungkapkan bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang berkualitas dan hebat harus melibatkan seluruh komponen masyarakat, khususnya di jajaran legislatif.

Untuk itu, pihaknya merekomendasikan kepada pimpinan DPRD Sidoarjo untuk selalu membuka ruang-ruang diskusi atau dialog demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita merekomendasikan kepada pimpinan (DPRD Sidoarjo, red) itu, untuk selalu mempertahankan ruang-ruang diskusi, dialog, komunikasi demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Karena hal-hal itu, jika tidak dipertahankan akan menghambat sinergitas antara eksekutif dan legislatif,” terangnya.

Sekali lagi, anggota legislatif dari Kecamatan Tulangan itu menyampaikan bahwa tidak kuorumnya sidang paripurna, hendaknya menjadi catatan penting bagi para pimpinan DPRD Sidoarjo.

Ia berharap dalam rapat-rapat paripurna kedepannya, tingkat kehadiran anggota DPRD Sidoarjo bisa maksimal atau paling tidak bisa memenuhi kuorum sebesar 50 persen plus satu, apalagi saat-saat pengambil keputusan.

“Dinamika itu sudah biasa, dan harus ada untuk meningkatkan kualitas kita di parlemen. Tapi tingkat kehadiran itu lebih penting, khususnya saat pengambilan keputusan,” pungkasnya.

(mams)

SEJAHTERA TIDAK HARUS KAYA

## Studi Harvard: Masyarakat RI Tersejahtera di Dunia

Studi *Global Flourishing Study* menempatkan Indonesia sebagai negara paling sejahtera, menantang asumsi tentang kebahagiaan dan kesejahteraan. Hasil studi menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peringkat tinggi dalam aspek-aspek yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

BERDASARKAN penelitian yang dilakukan oleh Universitas Harvard, Baylor University, dan lembaga survei internasional Gallup, Indonesia baru-baru ini dinobatkan sebagai negara paling sejahtera di dunia. Studi ini, yang dikenal sebagai *Global Flourishing Study* (GFS), melibatkan lebih dari 200.000 responden dari 22 negara dan menyoroti berbagai faktor yang lebih luas dari sekadar



**ILUSTRASI KESEJAHTERAAN:** Sebuah keluarga di desa Kediri, Jawa Timur, ber-Lebaran. Negara-negara yang memiliki hubungan sosial kuat dan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih baik menurut *Studi Global Flourishing Study*.

kekayaan materi.

Menansir *New York Times*, Senin (5/5/2025), indikator dalam survei ini tidak hanya melihat seputar

kondisi keurangan responden, namun juga menyentuh aspek-aspek mendasar seperti kesehatan fisik, kebahagiaan, makna hidup,

karakter, hubungan sosial, dan kesejahteraan spiritual.

Menariknya dalam hasil survei ini, secara keseluruhan Indonesia dinyatakan sebagai negara paling sejahtera di dunia walaupun mayoritas penduduknya berpenghasilan cukup kecil jika dibandingkan dengan negara-negara responden lainnya.

"Indonesia bukanlah negara kaya, tetapi negara ini memiliki peringkat tinggi dalam hal hubungan dan karakter *pro-sosial*, yang mendorong hubungan sosial dan komunitas," tulis laporan itu.

"Di sisi lain, Jepang tercatat sebagai negara dengan penduduk paling tidak makmur. Meskipun merupakan negara kaya yang penduduknya cenderung hidup hingga usia lanjut, penduduk Jepang cenderung tidak memiliki teman dekat," jelas penelitian yang

« BACA: Studi Harvard ... hal 2

**DUTA**

# Ini Faktor yang Pengaruhi Hasil

■ Sambungan dari Hal 1

## Studi Harvard

dilakukan Harvard ini. *Salah satu peneliti studi, Brendon Case menjelaskan satu-satunya negara dengan pendapatan tinggi yang masuk dalam posisi teratas daftar tersebut adalah Israel dan Polandia. Mayoritas mereka yang berada di negara maju menunjukkan hubungan dan komunitas sosial yang kurang bermakna, kurang memuaskan, dan kurang memiliki emosi positif dibandingkan mereka yang berada di negara kurang berkembang.*

Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di negara-negara berkembang mungkin tidak memiliki penghasilan yang tinggi. Namun mereka memiliki persahabatan, pernikahan, dan keterlibatan dalam masyarakat yang lebih baik terutama dalam komunitas keagamaan.

kan bahwa hasil-hasil tersebut (kekayaan, umur panjang) tidak penting, atau bahwa kita tidak peduli dengan demokrasi, kita tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi, kita tidak peduli dengan kesehatan masyarakat terutamanya.

### Peringkat Negara-Negara

Perbedaan peringkat menunjukkan bahwa kekayaan materi bukanlah satu-satunya pemenuh kesejahteraan. Negara-negara yang memiliki hubungan sosial kuat dan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih baik.

Hal ini menjadi pelajaran penting bagi negara-negara lain untuk lebih memperhatikan aspek-aspek sosial dan spiritual dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan laporan Global Flourishing Study 2025, dikutip dari Euronews, berikut daftar urutan negara paling sejahtera dan total indeksinya:

1. Indonesia (8,10)
2. Israel (7,87)
3. Filipina (7,71)
4. Meksiko (7,64)
5. Polandia (7,59)
6. Nigeria (7,57)
7. Meksiko (7,50)
8. Kenya (7,29)
9. Tanzania (7,14)
10. Argentina (7,14)
11. Hong Kong (7,12)
12. Amerika Serikat (7,11)
13. Swedia (7,10)
14. Afrika Selatan (7,07)
15. Brazil (7,00)
16. Jerman (7,00)
17. Australia (7,01)
18. Spanyol (6,90)
19. India (6,87)
20. Britania Raya/Inggris (6,79)
21. Turki (6,32)
22. Jepang (5,89)

### Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Studi ini menekankan beberapa faktor penting yang mempengaruhi hasil kesejahteraan di Indonesia, di antaranya:

- Kesehatan fisik dan mental: Kondisi kesehatan secara keseluruhan sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup individu.
- Kebahagiaan dan kepuasan hidup: Tingkat kebahagiaan individu menjadi indikator penting dari kesejahteraan.
- Makna dan tujuan hidup: Adanya rasa tujuan dalam kehidupan sehari-hari berkontribusi pada kebahagiaan.
- Karakter dan kebajikan: Nilai-nilai moral dan etika yang dianut individu dapat meningkatkan kualitas hubungan sosial.
- Hubungan sosial: Kualitas hubungan dengan keluarga, teman, dan komunitas menjadi faktor kunci dalam kesejahteraan.
- Keamanan finansial: Stabilitas keuangan dan rasa aman secara ekonomi sangat penting bagi kesejahteraan.
- Kesejahteraan spiritual: Hubungan dengan hal-hal yang lebih besar dari diri sendiri dapat memberikan makna dalam hidup.

CS Scanned with CamScanner

DUTA

## Admin Medsos OPD Pemkab

# Tingkatkan Kemampuan “Secara Profesional Berbasis Data”

SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo meningkatkan kompetensi para admin media sosial (medsos) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sidoarjo menargetkan para admin mampu mengelola media komunikasi publik secara profesional berbasis data.

Senin sore (5/5/25), seluruh admin medsos OPD mengikuti program pelatihan pengelolaan medsos yang digelar di Aula BKD Sidoarjo selama tiga hari. Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Fenny Apridawati, hadir langsung membuka pelatihan hari pertama.

Sekda Fenny mengapresiasi pelaksanaan pelatihan tersebut. Menurutnya, saat ini medsos memegang peranan penting dalam penyebaran informasi. “Era pertelevisian sebagai sumber berita sudah bergeser ke medsos. Sekarang yang berjaya adalah medsos, dan panjenengan semua yang menguasainya,” ujarnya di hadapan puluhan admin medsos OPD.

Fenny meminta agar pemanfaatan semua kanal medsos dimaksimalkan, tidak hanya terpaku pada satu platform. Hal ini penting untuk



Seluruh admin medsos OPD mengikuti pelatihan pengelolaan medsos di Aula BKD Sidoarjo selama tiga hari mulai kemarin

mempercepat penyampaian informasi pembangunan Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat. Selain itu, ia menekankan pentingnya respons cepat terhadap aduan masyarakat melalui komentar di medsos pemerintah.

“Begitu ada masyarakat yang komen dan perlu direspons, yang penting dijawab cepat dulu,” pintanya.

Fenny juga meminta para admin medsos bersinergi dan berkolaborasi dengan pimpinan

masing-masing, mulai dari kepala bidang hingga kepala OPD. Ia bahkan akan mewajibkan para kepala OPD turut menjadi admin medsos sebagai bentuk kontrol dan pengawasan pemanfaatan medsos pemerintah.

“Saya minta tolong admin medsos diaktifkan lagi. Kemudian pimpinan OPD juga wajib menjadi admin medsos, dan resep sinergi, kolaborasi, glorifikasi, serta aktivasi harus betul-betul direfresh,” tegasnya.

Sementara itu, terpisah Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo, Noer Rochmawati Selasa (6/5/25), menyampaikan bahwa pemanfaatan medsos sebagai media komunikasi publik pemerintah memiliki manfaat signifikan. Oleh karena itu, para admin OPD perlu dibekali strategi mengelola konten medsos pemerintah daerah.

Dalam pelatihan tersebut, mereka juga dikenalkan dengan pemanfaatan teknologi artificial intelligence (AI) dan big data unlimited untuk merancang komunikasi publik yang tepat sasaran. Selain itu, admin OPD akan dilatih menggunakan media monitoring untuk mendeteksi opini publik dan isu strategis.

“Untuk mendukung pengelolaan medsos ini, Bapak Bupati juga telah memberikan fasilitas khusus kepada para admin, yakni langganan gratis satu bulan CapCut Pro,” ungkap Noer Rochmawati. ● Loe

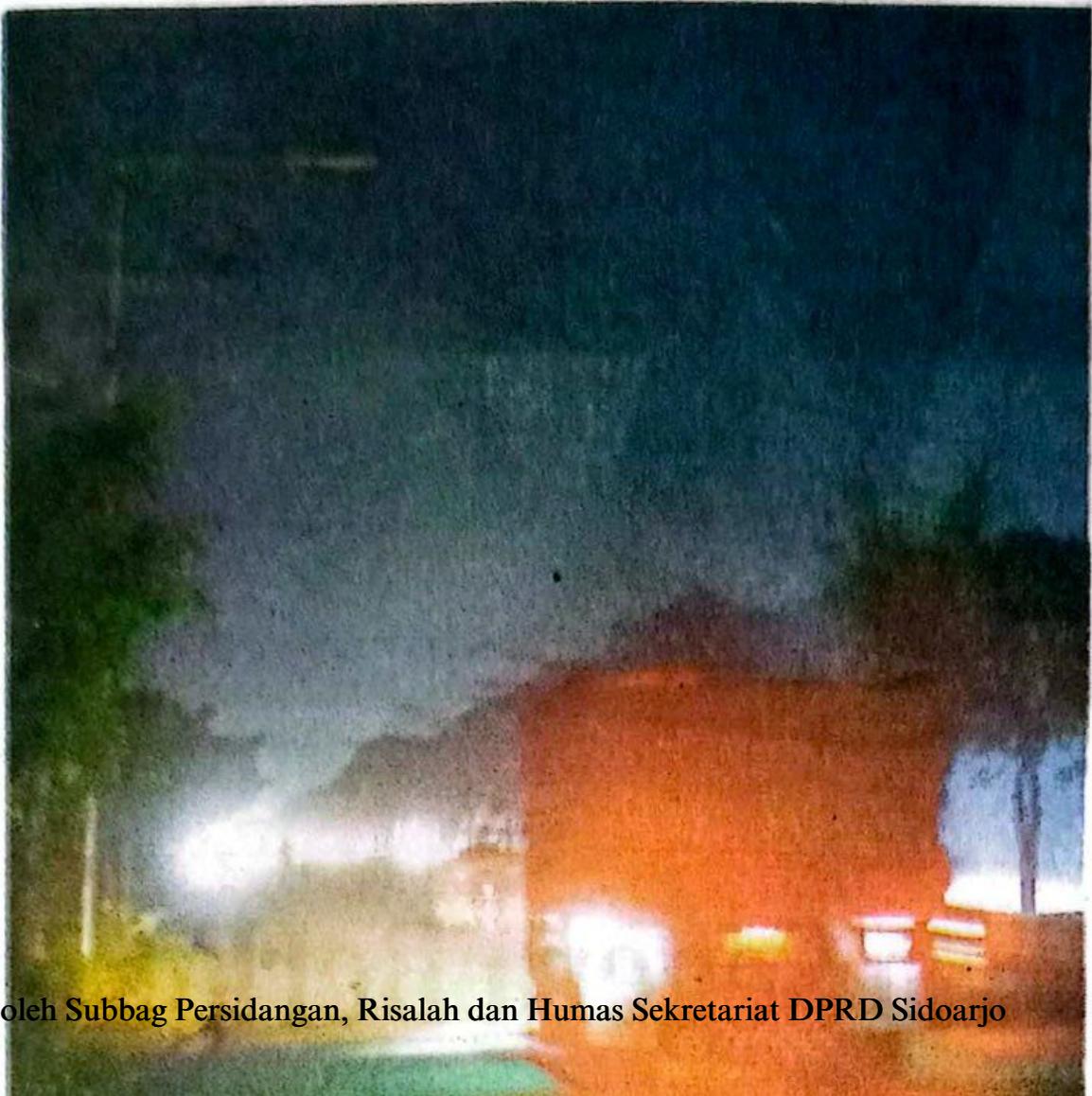


Scanned with CamScanner

Editor: Imam Ghozali Layout: Y...

**DUTA**

# KILAS DELTA



**PERLU PERBAIKAN:** Lampu penerangan jalan umum di Jalan Raya Porong, Kecamatan Tanggulangin, padam, pada Selasa (6/5) dini hari.

## PJU Jalan Raya Porong Sudah Sebulan Mati

**LAMPU** penerangan jalan umum (PJU) di Jalan Raya Porong sudah sebulan ini mati. Sejumlah pengendara mengeluhkan kondisi gelap dan rawan laka. Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo akan melakukan perbaikan.

"Jadi lebih hati-hati, gelap dan jalanan bergelombang juga agak bahaya," kata Rudi, salah satu warga sekitar kemarin (6/5). Menurut pria 51 tahun itu lokasi tersebut cukup sering terjadi laka. "Kebanyakan laka tunggal, karena tidak lihat ada lubang," ungkapnya.

Kepala Bidang PJU Sidoarjo Drian Isa Yostofa mengaku, timnya terus keliling untuk mengecek dan melakukan perbaikan di titik yang dilaporkan. "Kami akan tindak lanjuti jika memang ada laporannya, akan kita cek," ujarnya.

Yostofa mengatakan, matinya PJU sering disebabkan masalah pada jaringan kabel, konektor, dan pergantian LED. Selain itu, dia menyebut selama musim penghujan ini banyak laporan masuk. Hingga pekan lalu, ada 22 laporan PJU mati di call center 112. (eza/uzi)



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



ANGGER BONDAN/JAWA POS

**MELANGGAR:** Satpol PP menertibkan reklame yang menyalahi aturan di Jalan Raya Buduran, Banjarkemantren, kemarin (6/5).

## Satpol PP Bongkar 9 Reklame yang Dipasang di Trotoar

**SIDOARJO** - Satpol PP Sidoarjo membongkar 9 reklame di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, Candi, dan Jalan Raya Buduran kemarin (6/5). Masing-masing dinilai menyalahi peraturan.

Kasi Ops Satpol PP Sidoarjo R Novianto Koesno menjelaskan, jenis pelanggaran di dua titik itu berbeda. Di Candi, empat reklame terpasang di trotoar. "Dampaknya mengganggu akses pejalan," ujarnya.

Di Buduran, lanjutnya, lima reklame didapati juga terpa-

sang menjorok ke trotoar. Selain itu, masa berlaku pajaknya sudah habis. "Izin sudah kadaluwarsa sehingga dibongkar," ungkapnya.

Novi mengungkapkan, reklame tidak boleh dipasang di sembarang tempat. Lokasinya diatur dalam peraturan daerah (Perda). Termasuk jenis iklan yang terpasang. Novi menyatakan, ada petugas yang melakukan pemantauan. "Bergerak setiap hari, kalau ada yang menyalahi aturang langsung ditindak," katanya. (edi/uzi)

CS Scanned with CamScanner

# 212 Warga Tropodo Terjangkit ISPA

DLHK-Disperindag  
Jatim Cari Solusi  
Polemik Usaha Tahu

**SIDOARJO** - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo menggandeng Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim untuk mencari solusi permasalahan penggunaan sampah sebagai bahan bakar tungku pembakaran tahu. Apalagi, sejak Januari-April, kasus Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Tropodo tembus 212 kasus.

"Hari ini (kemarin, Red) kami bertemu dengan Disperindag Jatim terkait penggunaan limbah sampah plastik. Kami koordinasikan solusi terbaiknya bagaimana," kata Kepala DLHK Sidoarjo M Bahrul Amig.



Kami telah menerima edaran terkait larangan penggunaan sampah plastik sebagai bahan bakar tungku tahu. Kami tindak lanjuti dengan monitoring dan evaluasi."

**AHMAD FAUZI**  
Camat Krian

Sebab, fenomena tersebut merugikan lingkungan.

"Kami memandang, lingkungan hidup menjadi korban dari usaha ekonomi yang mu-

rah tapi tidak ramah lingkungan," tegasnya. Apalagi, berdasarkan data Puskesmas Krian, ada sebanyak 212 warga Tropodo Krian mengalami gangguan ISPA sejak Januari-April.

Kepala Puskesmas Krian Titik Sri Harsasih menyebut angka kasus masih tergolong tinggi. "Tropodo konsisten menyumbang di atas 50 kasus tiap bulan," ujar Titik. Rinciannya, 62 kasus di Januari, 49 kasus di Februari, 51 kasus di Maret, dan 50 kasus di April.

Camat Krian Ahmad Fauzi akan terus sosialisasi dan mengevaluasi pengusaha tahu di wilayahnya. "Kami tindak lanjuti ke masyarakat dengan *monitoring* dan evaluasi," ujarnya. Menurutnya terdapat sekitar 60 pengusaha tahu di Dusun Klagen yang menjadi sasaran pemantauan. (eza/uzi)



**TINJAU  
LOKASI:**  
Petugas  
DLHK  
Sidoarjo dan  
petugas dari  
Kecamatan  
Krian  
memantau  
tempat  
produksi  
tahu di Desa  
Tropodo,  
Krian,  
kemarin (6/5).

DLHK SIDOARJO

Jawa Pos

BIRO SIDOARJO  
Penjabat: H. Beni Sowo, S.Sos  
Kasubid/Perangko: H. Abdul Kholiq, S.Ag  
Wakil: H. Ody ST, Wartawan: Fauzi  
Bendah: H. Suci, Ach. Samet  
Alamat Kantor: Jl. Lemahputro  
No. 146 Sidoarjo  
E-mail: [idek@sidarjo.go.id](mailto:idek@sidarjo.go.id) | [info@sidarjo.go.id](mailto:info@sidarjo.go.id) | [web@sidarjo.go.id](mailto:web@sidarjo.go.id)  
Telp: 081330770441

BIRO JEMBER  
Yakub Muliono,  
Suwang Priyitno

## SIDOARJO-JEMBER

Rabu Wage, 7 Mei 2025

# BUPATI SIDOARJO APPRECIASI BANTUAN 60 JAMBAN BANK JATIM, JAMBAN SEHAT KURANG 2000

**Sidoarjo, Pojok Kiri,**  
Bank Jatim menyerahkan bantuan program Corporate Social Responsibility (CSR) berupa 60 unit jamban sehat kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Bantuan itu diberikan di sela perserian kantor Cabang Pembantu (Capem) Waru, Senin (5/5/2025).

Perserian kantor baru di Ruko Gateway Blok B2, Jalan Raya Waru tersebut dihadiri Bupati Sidoarjo Subandi dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Bupati Subandi pun mengapresiasi bantuan program CSR 60 unit jamban sehat itu. Bantuan ini menjadi

bagian dari komitmen Bank Jatim dalam mendukung peningkatan kualitas sanitasi di daerah.

Menurut Subandi, hal ini menjadi kontribusi nyata Bank Jatim dalam pembangunan daerah. Meskipun Sidoarjo sudah ditetapkan sebagai daerah bebas buang air besar sembarangan (ODF) dan menerima penghargaan nasional, masih ada sekitar 2.000 rumah yang belum memiliki jamban layak.

"Insya Allah kekurangan ini akan kita kejar bersama masyarakat dan melalui program CSR. Kami juga rutin turun ke lapangan setiap akhir pekan untuk memas-

tikan warga yang kurang mampu mendapat perhatian," ujar Subandi.

La mengaskan, Pemkab Sidoarjo tidak akan tinggal diam melihat warga hidup dalam kondisi tidak layak, apalagi dengan anggaran daerah yang mencapai Rp5,2 triliun. Salah satu bentuk nyata kepedulian tersebut adalah distribusi makanan gratis bagi warga kurang mampu yang dilakukan secara rutin.

Dalam hal pelayanan perbankan, Subandi juga mendorong agar Bank Jatim dapat menghadirkan bunga pinjaman yang rendah serta akses pembiayaan yang mudah, khususnya bagi pelaku

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Sidoarjo punya sekitar 250 ribu pelaku UMKM. Dukungan perbankan sangat vital untuk mendorong pertumbuhan mereka," tambahnya.

Direktur IT, Digital dan Operasional Bank Jatim, Zuhelfi Abidin, menjelaskan bahwa Bank Jatim saat ini memiliki lebih dari 100 triliun rupiah aset dan mencetak laba tahunan di atas Rp1 triliun.

Seluruh keuntungan tersebut dikembalikan ke daerah karena kepemilikan saham Bank Jatim ada di Pemerintah Provinsi serta 38 kabupaten/kota di Jawa



Timur.

"Ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai bank milik daerah. CSR menjadi salah satu cara

kami berbagi kembali kepada masyarakat," ucap Zuhelfi.

Sementara itu, Kepala Bank Jatim Cabang Sidoarjo

jo, Suyatno, menyatakan bahwa Capem Waru telah berdiri sejak 2010 dan terus berkembang. Relokasi ke lokasi baru dilakukan atas pertimbangan bisnis dan posisi strategis untuk melayani masyarakat lebih optimal.

“Kami bangga bisa terus bermitra dengan Pemkot Sidoarjo. Selain jamuan sehat, tahun ini kami juga menganggarkan program CSR lainnya seperti lampu taman yang saat ini masih dalam proses,” pungkasnya (Khol/Dy)

POJOK KIRI  
KORAN RAKYAT



PENCEMARAN LINGKUNGAN: Tim DLHK Sidoarjo saat sidak industri tahu di Desa Tropodo.

# DLHK Larang Pembakaran Sampah Plastik di Industri Tahu Tropodo

DINAS Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo secara resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) yang melarang penggunaan limbah non-organik seperti karet, spons, styrofoam, dan sejenisnya sebagai bahan bakar dalam proses produksi tahu di Desa Tropodo, Kecamatan Krian. Larang-

an ini dikeluarkan sebagai upaya menekan tingkat pencemaran udara di wilayah tersebut.

Kepala DLHK Sidoarjo, Bahrul Amig, menjelaskan bahwa pembakaran limbah plastik dan bahan non-organik lainnya menghasilkan emisi berbahaya, termasuk partikel debu halus (PM2.5) yang melebihi ambang batas aman. Berdasarkan pemantauan, ditemukan konsentrasi partikel tersebut dalam radius 300 meter dari cerobong industri.

“Kami mendapati tingkat risiko pajanan PM2.5 mencapai 19,8. Ini menunjukkan potensi bahaya tinggi terhadap kesehatan masyarakat di sekitarnya,” ujar Amig, Selasa (6/5/2025).

Ia menegaskan bahwa praktik tersebut tidak hanya berbahaya bagi kesehatan, tetapi juga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Setiap pelanggaran terhadap baku mutu udara ambien dapat dikenakan sanksi pidana hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar,” tegasnya.

Amig mengungkapkan bahwa larangan serupa sebenarnya pernah diterbitkan pada tahun 2022.



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## DILHK Larang...

Namun, lemahnya pengawasan dan sulitnya akses bahan bakar alternatif seperti kayu, membuat sebagian pelaku usaha kembali menggunakan limbah plastik sebagai bahan bakar.

“Karena itu, kami akan memperketat pengawasan terhadap industri tahu di Tropodo. Jika ditemukan pelanggaran,

nksi tegas akan diberikan demi menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan warga," jelasnya.

Menindaklanjuti SE tersebut, Camat Krian Ahmad Fauzi mulai lakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha di Desa Tropodo. "Melihatnya 60 industri tahu akan menjadi sasaran evaluasi.

Kami telah menerima Surat

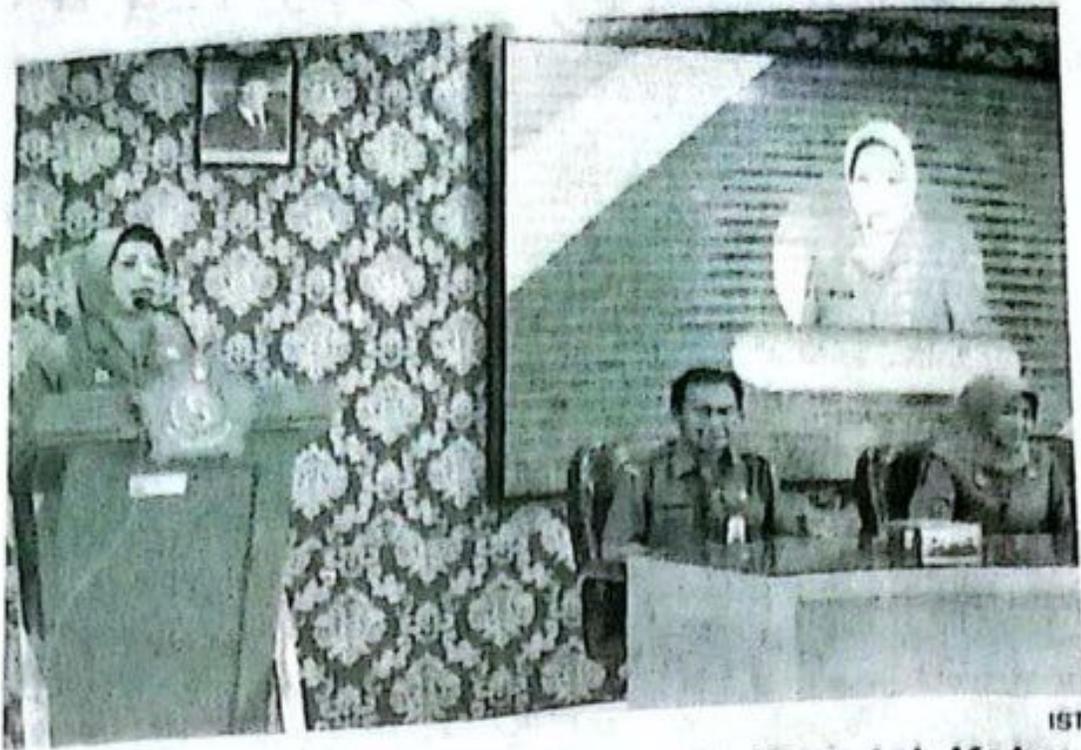
Edaran dari DLH  
mensosialisasikan  
kepada masyarakat  
usaha," ujar Fauzi

Ia menambahkan  
juga aktif berkoordinasi  
DLHK untuk memastikan  
termasuk penyediaan  
alternatif yang layak  
lingkungan. (sa)

HK dan akan segera  
an isi larangan ini  
akat dan pelaku  
azi.  
kan bahwa pihaknya  
ordinasi dengan  
encari solusi terbaik,  
diaan bahan bakar  
ebih ramah  
(ivvga)

CS Scanned with CamScanner

 **RADAR**  
SIDOARJO.ID



157  
**KEAHLIAN:** Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati saat memberikan sambutan.

# Pemkab Dorong Peningkatan Kualitas Publik

# Komunikasi Publik

**PEMERINTAH** Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus mendorong peningkatan kualitas komunikasi publik dengan mengembangkan kemampuan para admin media sosial (medsos) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Pemkab Sidoarjo menggelar pelatihan pengelolaan media sosial.

Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati. Dalam sambutannya menekankan pentingnya pemanfaatan media sosial sebagai salah satu saluran komunikasi publik di era digital.

Fenny juga mengingatkan agar para admin tidak terpaku hanya pada satu platform media sosial. Menurutnya, penggunaan berbagai kanal akan memperluas jangkauan informasi ke masyarakat. Ia menekankan pentingnya respons cepat terhadap komentar atau aduan dari masyarakat di platform resmi pemerintah.

"Begitu ada komentar dari masyarakat, respon cepat sangat penting. Jangan sampai aduan dibiarkan tanpa tanggapan," tegasnya.

Lebih lanjut, ia meminta para admin untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pimpinan masing-masing OPD. Bahkan, ia mengusulkan agar kepala OPD turut menjadi admin sebagai bentuk pengawasan

admin sebagai admin P-10  
dan keterlibatan langsung dalam  
pengelolaan medsos.

“Saya minta akun medsos OPD  
lebih aktif lagi. Kepala OPD juga  
wajib menjadi admin untuk memas-  
takan kolaborasi, sinergi, glorifikasi,  
dan aktivasi berjalan optimal,”  
tegas Fenny.

Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo,  
Noer Rochmawati, menjelaskan  
bahwa pelatihan ini dirancang untuk  
membekali admin medsos OPD  
dengan kemampuan strategis dalam  
pengelolaan konten. (sai/vga)



Scanned with CamScanner

## Dhamroni Chudlori Sambangi Gubuk Reyot Milik Salamun di Desa Bulang

Redaksi Mei 07, 2025

0



Dhamroni Chudlori saat berbincang dengan Mbah Salamun

Jawapes, SIDOARJO – Seorang duda bernama Salamun (70) tinggal bersama cucunya di wilayah Dusun Gempol Legi Desa Bulang Kecamatan Prambon. Keduanya tinggal di sebuah gubuk yang sudah reyot dan tidak layak huni. Bagaimana tidak? Rumahnya Mbah Salamun ini separuh semen, separuh tanah. Dinding bambunya juga sudah miring. Begitu juga dengan atapnya sudah mau roboh.

Dalam kehidupan sehari-hari, Mbah Salamun ini dapat bantuan sosial, namun terkadang kakek 70 tahun ini masih menjadi buruh tani.

Salah seorang anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori menyambangi rumah Mbah Salamun pada Senin (5/5/2025). Saat disambangi itu, Mbah Salamun sedang duduk didepan rumahnya. Apalagi kedatangan anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori itu bersama Kades Bulang Wulyono dan Kasun Gempol Legi Didik Sugianto serta pegawai sosial.

"Nopo o nggriyane (kenapa rumahnya)," tanya Dhamroni menyapa Mbah Salamun.  
"Nggih ngeten niki (ya seperti ini)," jawab Mbah Salamun.

Setelah itu, Dhamroni Chudlori bercerita bahwa dirinya dapat laporan tentang kondisi rumah Mbah Salamun yang tidak layak huni. Dia mengatakan bahwa kedatangannya ingin melihat secara kondisi rumah Mbah Salamun.

Melihat kondisi rumah dan Mbah Salamun yang memprihatinkan, Dhamroni Chudlori pun secara langsung menyerahkan bantuan dari kantong pribadinya dan menanyakan status kepemilikan rumah mbah Salamun.

Kasun Gempol Legi Didik Sugianto menjelaskan terkait perkara status tanah warga kampungnya. Hampir seluruh rumah warga dusun ini berdiri di atas tanah eigendom. Eigendom adalah status kepemilikan lahan yang berlaku di masa penjajahan Belanda. Bukan tanah dengan sertipikat hak milik (SHM) seperti saat ini.

"Di sini ada 36 rumah, dan penduduknya 33 kepala keluarga," jelas Didik Sugianto, yang disaksikan Kades Bulang Wulyono.

Dhamroni Chudlori mendengarkan penjelasan panjang lebar dari Kasun Didik Sugianto maupun Kades Wulyono. Sebagai mantan ketua Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori sedikit banyak paham ihwal status kepemilikan tanah. Dia menyarankan Kasun dan Kades segera membantu menguruskan status tanah warga Dusun Gempol Legi tersebut.

"Dicoba saja. Karena sudah puluhan tahun menempati, ada peluang menjadi hak milik. Yang penting sesama warga harus sepakat dulu. Jangan sampai malah muncul masalah antar warga sendiri," terang Dhamroni Chudlori.

"Iya, Pak. Ada yang menempati tanah luas, ada yang biasa," jawab Kasun Didik Sugianto.

Sementara Kepala Desa Bulang Wulyono pun menyatakan siap untuk membantu warganya terkait kepemilikan tanah itu. Dia juga berterima kasih anggota DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori yang telah mengunjungi desanya.

Sebelum mengakhiri kunjungannya, Dhamroni Chudlori menegaskan, sangat ingin membantu Salamun atau warga lain yang layak dapat santunan sosial. Namun, faktanya tidak mudah. Ada kendala soal status kepemilikan tanah yang ditempati rumah mereka. Ada aturan hukum yang harus dipatuhi. Sampai rumah mereka menjadi hak milik yang sah.

"Kalau status tanahnya masih eigendom, sulit mengalokasikan bantuan dari dana APBD maupun program sosial lain. Ayo cepat diurus ya Pak Kasun, Pak Kades," tegas anggota DPRD Sidoarjo yang suka blusukan tersebut. (Ty)



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Pendapatan,realisasi pendapatan daerah.

sebesar Rp. 5,330 triliun atau 100, 4,86%. Anggaran sebesar Rp.5.086 triliun. Rincian organisasi pendapatan pada tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan asli daerah (PAD), selesai penerimaan dari PAD sebesar Rp. 2.353 triliun, 76% atau 11. 1% dari anggaran yang ditetapkan. Pendapatan transfer, pendapatan merupakan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terealisasi sebesar 2,179 triliun atau 100, 44%. Di anggaran yang ditetapkan lain-lain pendapatan yang sah.

Komponen penerimaan lain-lain pendapat yang sah teralisasi sebesar 99,684 juta atau 9, 24% dari anggaran yang ditetapkan. Belanja, teralisasi belanja daerah sebesar 5,251 triliun, 40% atau 92, 96% dari anggaran sebesar 5.648 triliun. Teralisasi anggaran berdasarkan kelompok belanja diuraikan sebagai berikut belanja operasi organisasi 29 83% dari anggaran sebesar 25,432 milyar .



Transportasi transfer bagi hasil pajak dan retribusi ke kota daerah peserta transfer bantuan keuangan sebesar 612,69 milyar atau 99, 282% dari anggaran sebesar 560 juta selisih antara pendapatan dan kepada anggaran ke 2434 Cell . Pembayaran-pembiayaan merupakan transaksi keuangan pemerintah daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar akan diterima kembali dan dimasukkan untuk menutupi defisit atau pelan-pelan surplus dengan pendidikan sebagai berikut :

Penerimaan organisasi-penerimaan pembayaran daerah sebesar 553,048 juta , pembiayaan daerah sebesar 2.062 miliar sisa lebih pembiayaan anggaran Silva pada tahun anggaran 2024, 774.655 milyar atau 20%. Kedua laporan perubahan saldo anggaran yang lebih yaitu laporan keuangan yang menjanjikan informasi **Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Regulasi dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo** dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan perubahan 1 anggaran yang lebih untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2024 terdapat saldo anggaran yang lebih sebesar 642.775 miliar 775 juta dari saldo anggaran lebih awal sebesar 511.092 miliar atau 5%, sehingga terdapat kenaikan sebesar 25, 57%. Neraca yaitu laporan menggambarkan posisi keuangan suatu identitas pelaporan mengenai aset kewajiban. Dan kewajiban kita pada tanggal tertentu rincian rencana per 31 desember sebagai berikut aset yaitu laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambahkan efektivitas dan penggunaan yang dikelola oleh pemerintah. Untuk kegiatan pemerintah dalam satu periode laporan berdasarkan laporan operasional yang berakhir sampai dengan 3 Desember 2024 terdapat pendapatan sebesar 4,1 miliar 89% dengan beban sebesar 4,064 triliun 538% dan dari divisi dan kegiatan non operasional sebesar 15.415 miliar 18% sehingga terjadi surplus sebesar 33,272 miliar 59%.

Laporan ke-5 harus kasih laporan keuangan yang disajikan dengan aktivitas operasional pengeluaran saldo akhir pemerintahan daerah selama periode tertentu berdasarkan laporan per 1 Desember 2024. Dijelaskan sebagai berikut satu gas, awal 1 Januari 2024 Sebesar 512. 980. 000 sebesar 130,260 miliar 15%, per 31 desember 2024 sebesar 624,972 miliar 20%. Ke enam laporan perubahan ekuitas dalam laporan keuangan menjadikan informasi kenaikan atau penurunan kuantitas pada tahun 8 dibandingkan dengan tahun sebelumnya berdasarkan laporan perubahan kuantitas untuk produk yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 .Kuantitas akhir semester 854,766 juta 82% dan kuantitas awal sebesar 22,805 triliun 60%.

ke tujuh catatan nota laporan keuangan yaitu laporan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan yang ditutup berdasarkan standar akuntansi pemerintah berbasis aktual sehingga diperoleh informasi yang cukup atas angka yang tercantum dalam 6 laporan tersebut demikian penjelasan singkat laporan keuangan dan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 yang merupakan sebagian dari Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban melaksanakan APBD pada tahun anggaran 2024, semoga dalam pelaksanaan tugas kita senantiasa diberikan petunjuk Ridho dari Allah, akhir dari penyampaian dari Bupati Subandi.

Abdillah Nasih mengucapkan terima kasih kepada Bupati Sidoarjo, sebelum menutup acara telah menyampaikan bahwa dalam pembahasan Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024 akan dilakukan oleh badan anggaran DPRD sidoarjo, dengan mengucapkan Hamdallah bersama-sama, rapat Paripurna DPRD Sidoarjo rapat ke satu masa persidangan ke tiga tahun Sidang 2025 kami nyatakan di tutup. (Adv)

